

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya perubahan dunia secara global sangat mempengaruhi adanya daya saing bisnis secara *modern* dan cepat. Didukung pula oleh adanya revolusi teknologi yang membuat setiap pelaku bisnis mau tidak mau wajib turut ambil bagian dalam berkembangnya teknologi. Dengan begitu momen tantangan setiap perusahaan sangat bersaing dalam beradaptasi terkait dengan keberlanjutan melanjutkan usia bisnisnya. Setiap pelaku bisnis diwajibkan dalam berinovasi supaya perusahaannya dapat mempertahankan diri dan tetap berdiri pada persaingan yang ada. Bukan hanya itu, pelaku bisnis juga diharuskan dalam turut andil melayani secara efektif dan efisien serta berkualitas bagus melalui hasil produksi yang dikerjakannya, menurut pandangan Ardianto dan Ardini tahun 2019.

Perbankan ialah sebuah lembaga keuangan yang berkegiatan operasional tidak bisa dilepaskan oleh dana yang dipercayakan oleh pengguna jasanya atau nasabah. Kondisi aman aktivitas ekonomi sebuah negara bisa dipicu dari seberapa

baik kondisi sistem lembaga perbankan. Kegiatan perekonomian sangat bergantung pada lembaga keuangan, terutama perbankan, karena tanpa lembaga tersebut kegiatan menghimpun dan menyalurkan, serta mengelola keuangan akan sangat kesulitan, yang mana juga akan mempengaruhi sistem perkembangan sektor ekonomi sebuah perusahaan. Sebagai lembaga keuangan, perbankan merupakan salah satu lembaga yang dibutuhkan masyarakat sebagai pendukung kegiatan ekonomi (Nasri et al., 2021).

Di bidang perbankan, untuk tahun 2020, ialah masa ditentukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di negara-negara Asia Tenggara, yaitu syarat seluruh pekerja masuk ke negara-negara yang telah berpartisipasi. Artinya daya kompetisi para pekerja di Indonesia terus melakukan progres dan bertambah disiplin. Masyarakat akan berkompetisi untuk membuat diri mereka semakin kompeten dan berkualitas sehingga mampu menghadapi persaingan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang akan berdampak pada kemajuan bagi perkembangan dunia usaha dan hal kegiatan tersebut mampu mengedukasi masyarakat Indonesia agar mempunyai *mindset*, bahwasannya pendidikan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menimbang seberapa jauh sebuah kompetensinya dalam mempersiapkan persaingan dengan tenaga kerja asing (Bank Indonesia, 2016).

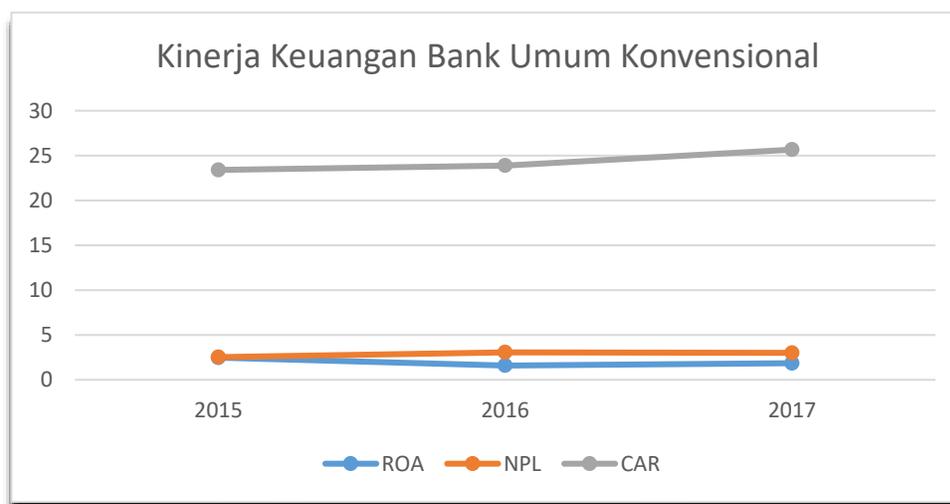
Pentingnya peranan perbankan, maka kesehatan bank harus terjaga karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Kepercayaan

masyarakat dapat diperoleh dengan menjaga tingkat kesehatan bank, untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat apakah bank tersebut dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank bahwa “kesehatan bank harus dipelihara atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat terjaga. Tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa tindakan perbaikan (*corrective action*) oleh bank maupun tindakan pengawasan (*supervisory action*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari berbagai aspek dan laporan keuangan seperti aspek utama dalam menilai kesehatan bank. Menurut Kasmir (2012), menjelaskan bahwa dengan melihat laporan keuangan bank maka dapat mengetahui kondisi keuangan bank seluruhnya. Berdasarkan laporan keuangan tersebut akan terlihat bagaimana keadaan bank sebenarnya, bahkan kelebihan serta kelemahannya dapat diketahui. Dengan menggunakan laporan keuangan tersebut, dapat diperhitungkan rasio-rasio keuangan sebagai komponen penilaian (Lestari et al., 2020). Salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan yaitu dengan melihat *financial performance* perusahaan.

Kinerja keuangan perbankan saat ini tidak dalam kondisi yang baik. Aset perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan dapat berupa aset berwujud (*tangible assets*) atau aset tidak berwujud (*intangibile assets*). Estimasi ini didasarkan pada data *financial performance* periode 2015-2017.



Gambar 1.1 *Financial Performance* Bank Umum Konvensional

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2017

Menurut Data OJK tahun 2015-2017 menunjukkan rata-rata *financial performance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kecenderungan menurun. Rata-rata *return on asset* tahun 2015 adalah sebesar 2,47%, kemudian terus menurun di tahun 2016 menjadi sebesar 1,59%, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 1,85%. Begitu hal nya dengan *non performing loan*, pada tahun 2015 diketahui sebesar 2,53%, namun naik di tahun 2016 sebesar 3,06% dan mengalami penurunan kembali tahun 2017 yaitu sebesar 1,85%.

3,00%. Walaupun kemudian terjadi kenaikan *capital adequacy ratio* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar 2,26%.

Data tersebut menunjukkan bahwa *financial performance* mengalami *trend* penurunan tahun 2017 karena kondisi tertentu. Dengan demikian agar *financial performance* dapat terjaga dengan baik, maka diperlukan adanya penilaian kinerja, kesehatan dan kualitas perbankan, salah satunya dengan menggunakan penilaian dari segi manajemen maupun melalui analisis laporan keuangan.

Kasus PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. yang kemudian disebut Bank Mandiri adalah bank BUMN dengan pengelolaan asset terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah asset senilai Rp. 1.405,85 triliun pada paruh ketiga 2020. Nilai tersebut tumbuh 10,28% dari periode yang sama di tahun lalu. Dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat akan industri perbankan, diperlukan adanya penilaian tingkat kesehatan bank pada Bank Mandiri karena bank tersebut merupakan satu diantara bank yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia yang menyangkut hal menyimpan dana maupun penyaluran kredit atau pinjaman modal. Sehingga dengan dilakukannya penilaian kesehatan bank maka Bank Mandiri dapat membenahi kelemahan-kelemahan yang dialami selama satu periode dan kedepan dapat meningkatkan kinerjanya.

Jika Bank Mandiri dapat meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun tentu masyarakat di Indonesia akan terus mempercayai Bank Mandiri sebagai tempat untuk menabung maupun melakukan pinjaman modal karena kredibilitas Bank

Mandiri dianggap baik. Dalam periode lima tahun terakhir (2016-2020), kinerja keuangan Bank Mandiri mengalami perkembangan yang meningkat, diantaranya yaitu laba bersih yang terus naik dari tahun ke tahun sebelum tahun 2020. Berikut merupakan grafik pertumbuhan laba bersih pada Bank Mandiri :



Gambar 1.2 Pertumbuhan Laba Bersih Bank Mandiri Tahun 2016-2020

Sumber: bankmandiri.co.id

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Bank Mandiri mengalami kenaikan laba bersih dari tahun ke tahun sebelum tahun 2020. Pada tahun 2016 memperoleh laba bersih sebesar Rp. 14,65 triliun dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun-tahun berikutnya yaitu 2017, 2018, 2019 secara berurutan sebesar Rp. 20,6 triliun, Rp. 25,01 triliun, dan Rp. 25,45 triliun. Selanjutnya, Bank Mandiri mengalami penurunan laba bersih yang signifikan yaitu turun menjadi Rp. 14,26 triliun. Hal tersebut merupakan akibat dari menurunnya jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat, sehingga Bank Mandiri mengalami penurunan laba bersih di tahun 2020. Tetapi merujuk pada target yang telah ditetapkan di akhir tahun sebelumnya Bank Mandiri berhasil

melampaui target yang telah ditetapkan, yang artinya kinerja keuangan Bank Mandiri tetap memuaskan sekalipun dalam kondisi pandemi.

Financial performance mendefinisikan sebagai ukuran subjektif tentang seberapa baik perusahaan menggunakan aset dari mode bisnis utamanya untuk menghasilkan pendapatan (Gofwan, 2022). Pada penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA). Semakin tinggi rasio yang dihasilkan oleh *return on assets* maka semakin baik pula performa suatu perusahaan dalam menggunakan aset dan dapat meningkatkan laba bersih (V. R. Putri & Riawan, 2022).

Good Corporate governance atau GCG ialah seperangkat pengaturan yang berfungsi sebagai peraturan, pengelola dan pengawas yang berhubungan dengan para pengelola perusahaan dalam mengembangkan *value* perusahaan, menurut pandangan Honi, 2020. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN serta pembaharuannya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Penerapan GCG menjadi penting karena memiliki tujuan profit dan menjamin keberlanjutannya (V. R. Putri et al., 2021). Manajemen perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai investasi

pemegang saham dalam jangka panjang dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, termasuk investor.

Pada tahun 2019 *Institute for Corporate Directorship* mengatakan bahwa Indonesia hanya memiliki lima perusahaan yang sudah masuk dalam kategori baik dalam penerapan GCG. Adapun, tiga di antaranya adalah bank papan atas. Sementara itu, bank lainnya masih dalam tahap implementasi menengah. Bahkan, banyak juga di antara pelaku industri perbankan tersebut yang belum patuh dalam penerapan prinsip GCG. Sedangkan pada tahun 2020 dari hasil penelitian LPPI, nilai rata-rata praktik GCG pada tahun kebelakang nampak membaik. Berdasarkan fenomena di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *good corporate governance* dalam industri perbankan masih kurang, hal ini diakibatkan oleh kurangnya peran manajer dalam mengelola tata kelola perusahaan.

Adanya teori keagenan menimbulkan masalah muncul ketika agen (perusahaan) gagal menjalankan perintah prinsipal (pemegang saham) dan bertindak oportunistik sesuai dengan kepentingannya sendiri. Kondisi pemegang saham yang tidak memiliki informasi sedetail manajemen dapat dimanfaatkan oleh manajemen yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan perusahaan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pemegang saham dan perusahaan kehilangan kepercayaan investor dan konsumen.

Salah satu fenomena yang mencerminkan kurangnya penerapan *corporate governance* yang dimanfaatkan oleh pihak manajemen yaitu adanya kasus pembobolan kredit Bank Jabar Banten kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi tahun 2015 senilai Rp38 miliar dan PT Alpindo Mitra Baja senilai Rp123 miliar. Ketua BAG mengatakan bahwa lembaganya memiliki dokumen yang menunjukkan pencairan kredit ke Koperasi Bina Usaha maupun PT Alpindo yang menyimpang dari prosedur. Pencairan kredit tersebut diduga karena ada pengaruh Gubernur Jawa Barat yang juga Komisaris BJB dengan kepemilikan saham mencapai 38 persen. Adanya penyimpangan prosedur normatif mengenai penyaluran kredit tersebut antara lain, tidak dipenuhinya persyaratan pokok administrasi permohonan kredit, kedua bank tidak melakukan verifikasi atas validasi data Koperasi Bina Usaha dalam analisis kredit dan penarikan dana hasil pencairan kredit melalui rekening '*end user*' Bank tidak dilakukan secara langsung oleh '*end user*' di kantor Bank. Selain itu pencairan kredit ke Koperasi dilakukan di luar jam operasional dan tanpa surat kuasa, koperasi sebagai pihak pengguna bahkan mengaku tidak menerima dana sesuai jumlah dalam daftar pinjaman, termasuk penyaluran kredit ke PT Alpindo juga tanpa analisis kredit yang memadai (*detikNews, 2015*).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa isu utama dari permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan persoalan moral dan etika yang kurang baik, *governance* yang buruk, pengawasan yang kurang, dan penegakkan hukum yang

lemah. Oleh karena itu, peran dari *corporate governance* tidak bisa diabaikan oleh suatu perusahaan. Lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sering disebut sebagai salah satu penyebab krisis keuangan di negara-negara Asia. Hal ini dikarenakan semakin terpisahnya hubungan para pemegang saham dengan manajemen, kurangnya transparan perusahaan dalam pelaporan kinerja keuangan, semakin tidak terkendalinya pengelolaan dan pengambilan keputusan, serta tidak efektifnya komite pengawas. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu profit dan market value yang maksimal.

Berdasarkan studi sebelumnya pada penelitian (Intia & Azizah, 2021) menggunakan proksi dewan direksi dan kinerja keuangan memiliki pengaruh positif terhadap dewan komisaris tetapi tidak berpengaruh terhadap dewan pengawas syariah. Penelitian (Monica & Dewi, 2019) dan (Sitanggang, 2021) yang mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit dan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Bertentangan dengan (Khoirunnisa Khoirunnisa, 2019) dan (Prayanthi & Laurens, 2020) bahwa dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya menurut (Wijayanti & Mutmainah, 2012) menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh signifikan dengan *financial performance* perbankan. Pada penelitian ini dinilai dengan melihat dewan komisaris independent, dewan direksi, dan komite audit.

Non Performing Loan (NPL) adalah Aktiva yang menjadi tulang punggung suatu bank adalah Kredit yang diberikan kepada debitur atau penempatan lain pada pihak ketiga (yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pemberian fasilitas kredit kepada pihak lain selain pemegang saham) yang dikelompokkan sebagai Aktiva Produktif. *Non Performing Loan* bank yang memiliki nilai yang tinggi dalam rasio kredit macetnya dapat dinilai tidak sehat karena perbandingan penerimaan dan beban yang ditanggung bank lebih besar daripada beban yang dikeluarkan. *Non Performing Loan (NPL)* mempunyai pengaruh tidak signifikan positif terhadap kondisi bermasalah pada bank. Artinya semakin tinggi rasio ini, kemungkinan bank berada dalam kondisi bermasalah semakin besar. Berdasarkan penelitian tersebut maka kemungkinan prediksi *Non Performing Loan (NPL)* terhadap *financial performance* adalah negatif. Artinya semakin rendah *Non Performing Loan (NPL)* suatu bank maka semakin baik *financial performance*.

Bank Permata pada awal tahun 2016 yang mengalami kondisi kesulitan keuangan berlanjut hingga Desember 2016 merupakan fenomena dari adanya kredit macet di perbankan. Bank permata melaporkan kerugian sebesar Rp6,48 triliun dengan membukukan kerugian sebesar Rp840 milyar pada Juni tahun 2016. Adanya kenaikan *gross non-performing loan* pada tahun 2015 sebesar 2,7% dan tahun 2016 8,8% serta meningkatnya net *non-performing loan* dari 1,4% menjadi 2,2% pada akhir tahun 2016. Hal tersebut menjadi penyebab atas kerugian dari Bank Permata (katadata.co.id).

Melambatnya pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab rasio NPL Bank Permata terus meningkat dalam periode tiga tahun terakhir. Sektor-sektor ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan selama tahun 2016 terdiri dari sektor pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan dimana peningkatan kredit bermasalah Bank Permata terjadi pada sektor industri pengolahan yang berkontribusi paling besar terhadap NPL bank, yaitu sebesar Rp1,09 triliun atau sebesar 27,27 persen dari total NPL dan disusul oleh sektor perdagangan yang menyumbangkan NPL sebesar Rp1,08 triliun atau sebesar 27%. Menurut beberapa informasi media massa, kualitas kredit yang kurang baik dan meningkatnya *non-performing loan* pada Bank Permata disebabkan karena adanya kredit macet yang dilakukan oleh Grup Gasindo. Grup Garasindo adalah salah satu perusahaan yang berada pada industri perdagangan terbesar sebagai improtir, Agen Pemegang Merek (APM) mobil dan motor kelas atas asal Eropa dan Amerika Serikat. Adapun merk mobil dibawah naungan perusahaan Garasindo yaitu Chrysler, Jeep, Fiat, Dodge, dan Alfa Romeo, untuk kendaraan bermotor bekerjasama dengan Peugeot Scooters, Italjet, dan Ducati. Grup Gasindo juga merupakan salah satu perusahaan yang menjadi debitur terbesar dari Bank Permata dengan nilai kredit sebesar Rp1,24 trilliun (*katadata.co.id*).

Kerugian besar yang dialami Bank Permata (BNLI) di tahun 2016 diantisipasi oleh pihak Bank dengan sangat cepat dan diyakini akan membawa perubahan di tahun 2017. Bank telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi

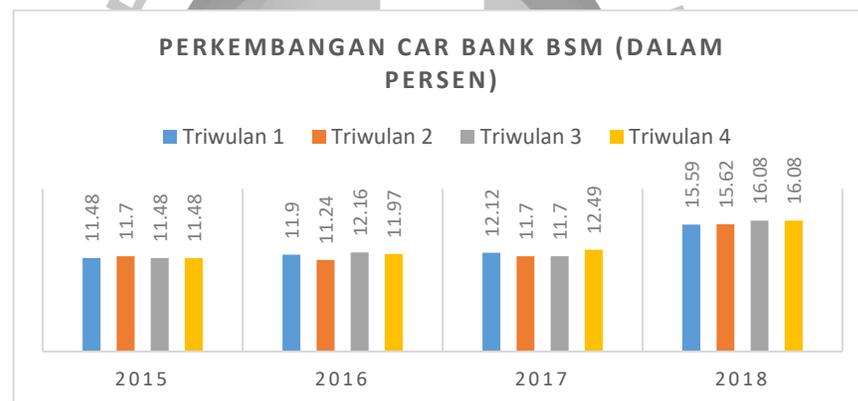
financial performance, antara lain melalui restrukturisasi aset maupun restrukturisasi keuangan secara proaktif. Langkah restrukturisasi aset yang dilakukan oleh Bank Permata antara lain yaitu meningkatkan kualitas aset dengan meningkatkan rasio pencadangan NPL dari Rp3,68 triliun pada Desember 2015 menjadi Rp12,2 triliun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Menjual aset bermasalah dengan nilai hingga Rp1,12 triliun sebagai salah satu langkah dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet. Dengan upaya tersebut, Bank Permata menargetkan rasio *Non Performing Loan* (NPL) perseroan bisa turun hingga 5 persen dalam satu tahun (*katadata.co.id*).

Pada penelitian ini *non performing loan* diukur dengan perbandingan jumlah kredit bermasalah dibagi jumlah kredit yang disalurkan oleh perusahaan. Penelitian (Irawati et al., 2019) dan (Tangngisalu et al., 2020) menyatakan bahwa *non performing loan* tidak berpengaruh terhadap *financial performance*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Brastama & Yadnya, 2020) yang menyatakan bahwa *non performing loan* berpengaruh signifikan terhadap *financial performance*.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. *Capital adequacy ratio* bank yang memiliki kewajiban penyediaan modal minimum yang tinggi, maka penambahan modal bank juga harus bertambah besar, dimana saldo penambahan modal akan tinggi jika pendapatan dan laba yang diterima bank juga

tinggi, atau beban yang dikeluarkan rendah. Semakin rendah CAR, kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Berdasarkan penelitian tersebut maka kemungkinan prediksi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *financial performance* adalah positif. Artinya semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin baik *financial performance* bank yang bersangkutan.

Permasalahan *capital adequacy ratio* digambarkan oleh Bank umum syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), dimana Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan dari *capital adequacy ratio* pada tahun 2016. Berikut data rata-rata *capital adequacy ratio* Bank Mandiri Syariah (BMS) yaitu:



Gambar 1.3 Perkembangan CAR Bank Mandiri Syariah Periode 2015-2018

Sumber: www.ojk.go.id

Data tersebut menyatakan bahwa adanya penurunan *capital adequacy ratio* terjadi karena adanya pengeluaran kas diluar anggaran, jumlah penarikan dana oleh nasabah yang semakin besar, dan kurangnya manajemen professional untuk mengelola. Hal tersebut terulang kembali pada tahun 2017 yang mengalami

Indonesia Banking School

penurunan *capital adequacy ratio* yang disebabkan karena lemahnya kinerja perusahaan yang berdampak pada menurunnya profitabilitas Bank Syariah Mandiri tersebut.

Perolehan CAR dari tabel diatas setiap tahunnya mengalami fluktuatif, Melihat rata-rata rasio CAR pada bank BSM pertriwulannya menunjukkan bahwa rata-rata rasio CAR berada diatas 8% sehingga dapat dikatakan kondisi permodalan pada bank BSM selama periode pengamatan (2015 – 2018) dalam kondisi baik walaupun pada tahun 2015-2017 BSM mengalami penurunan CAR yang cukup signifikan daripada tahun-tahun yang lain, namun Bank Syariah Mandiri dapat mengontrolnya sehingga tidak mencapai dibawah 8%.

Pengukuran kecukupan modal yang relevan digunakan dalam Bank Umum adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Bank Umum wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (BI, 2013). Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh CAR terhadap kemampuan kinerja keuangan. Pada hasil penelitian (Brastama & Yadnya, 2020) dan (Irawati et al., 2019) menghasilkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap *financial performance*, sedangkan penelitian (Rifansa & Pulungan, 2022) menghasilkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap *financial performance*.

CAR yang berpengaruh positif signifikan artinya semakin besar nilai CAR maka semakin besar tingkat kemampuan berkelanjutan perusahaan atau semakin

kecil nilai CAR maka semakin kecil tingkat kemampuan berkelanjutan perusahaan yang diukur dengan menggunakan *financial performance*, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank semakin baik untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko dan bank semakin mampu membiayai kegiatan operasional, Ketika rata-rata ATMR bank naik maka perolehan pembiayaan dari nasabah pun bertambah dan membuat pendapatan juga akan bertambah dan modal juga akan mengalami kenaikan.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (V. Putri & Putra, 2017). *Leverage* sering diartikan sebagai pendongkrak kinerja perusahaan dan identik dengan utang. *Leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Idawati, 2020). Berdasarkan penelitian dari Gitman dan Zutter tahun 2015, yakni ketika nilai rasio *leverage* membesar, maka akan terjadi peningkatan fluktuatif profit yang akan diperoleh perusahaan. Namun ketika jumlah nilai yang diberikan tepat terhadap rasio *leverage*, maka mampu menghasilkan profit terhadap perusahaan. Maka dari itu, setiap perusahaan wajib mewaspadai dan cermat terhadap jatah penggunaan rasio *leverage* dengan efektif dan efisien. Dalam penelitian ini variabel control *leverage* diukur dengan menggunakan *debt equity ratio* (DER).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Irawati et al., 2019) dengan hasil bahwa *capital adequacy ratio*, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan *non performing loan* memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Perbedaan penelitian penulis dan peneliti sebelumnya yaitu variabel *control* yaitu leverage, dimana peneliti sebelumnya tidak menggunakan variabel control.

1.2 Identifikasi Masalah

Financial performance merupakan hal yang penting bagi suatu perbankan, karena rasio tersebut menilai kemampuan perusahaan saat menggunakan anggaran yang ada seperti biaya operasi yaitu gaji pegawai, perlengkapan dan persediaan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan yang dilakukan perbankan serta biaya keuangan yang meliputi beban bunga atas pinjaman.

Corporate governance adalah sistem pengendalian internal atau *internal control* sebuah perusahaan yang bertujuan mengelola risiko yang signifikan dalam rangka melengkapi keinginan bisnis, kemudian dikerjakan beserta pengamanan asset dan peningkatan nilai investasi para investor dalam kurun masa yang panjang. *Good corporate governance* di sebuah perusahaan akan berperan penting ketika diterapkan dengan efektif, karena hal itu akan mampu menjadikan sebuah cermin dan barometer yang mana perusahaan tersebut sudah dalam kriteria baik atau sebaliknya.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini diciptakan agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Adapun pembatasan masalahnya yaitu:

1. Sampel perusahaan yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan tahunan yang didapatkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia ataupun situs resmi perusahaan perbankan pada periode 2017-2021.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* yang diukur dengan dewan komisaris independen, board size, dan komite audit
4. Indikator yang digunakan dalam mengukur potensi *financial performance* dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan total pendapatan dengan total beban.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *financial performance* pada sektor perbankan?

2. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap *financial performance* pada sektor perbankan?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *financial performance* pada sektor perbankan?
4. Apakah *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap *financial performance* pada sektor perbankan?
5. Apakah *Capital Adequency Ratio* berpengaruh terhadap *financial performance* pada sektor perbankan?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *financial performance* pada sektor perbankan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Dewan Direksi terhadap *financial performance* pada sektor perbankan.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap *financial performance* pada sektor perbankan.
4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh *Non Performing Loan* terhadap *financial performance* pada sektor perbankan.
5. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh *Capital Adequency Ratio* terhadap *financial performance* pada sektor perbankan.

6. Untuk menganalisis seberapa signifikan antar variabel baik itu variabel independen dengan variabel dependennya melalui pengujian F.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait *corporate governance*, *non performing loan*, dan *capital adequacy ratio* khususnya diindustri perbankan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan agar dapat memperoleh manfaat teoritis yaitu memperluas wawasan mengenai perbankan yang menerapkan GCG dan dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai referensi lebih lanjut mengenai pembahasan penelitian ini oleh peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini terdiri dari beberapa yaitu :

a. Bagi penulis

Penelitian ini mampu memberikan wawasan lebih, pengalaman dan pengetahuan bagi penulis, khususnya keuangan keberlanjutan terhadap perbankan. Serta dalam melengkapi syarat dalam menyelesaikan studi.

b. Bagi perusahaan

Penulis berharap, penelitian ini dapat menjadi media informasi dan bahan rujukan dalam menambahkan sebagai bahan referensi dan media

evaluasi tambahan bagi perusahaan yang berkaitan, sehingga dapat membantu perbankan dalam menaikkan lagi tingkat manajemen dan mengelola aset yang tidak berwujud, yang kemudian mampu mengembangkan dari segi aspek kompetensi *good corporate governance*, supaya dapat lebih baik dalam mempertimbangkan risiko dan profit sebuah perusahaan untuk kemudian menjadi lebih baik dan efektif ketika dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi akademisi

Dalam ranah akademisi, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan literasi dan referensi tambahan, baik berupa saran maupun tambahan penelitian berikutnya dalam konteks penelitian yang sama.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori tentang penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan berkenaan dengan desain penelitian yang akan dilakukan peneliti, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel juga jenis & sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik penyampelan serta analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, deskripsi data, hasil dari analisis data yang telah dilaksanakan oleh peneliti dan pembahasan.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir akan dijelaskan mengenai simpulan dari penelitian ini, keterbatasan dalam penelitian, serta saran dari peneliti terkait hasil penelitian yang ada untuk penelitian yang akan datang. Memberikan kesimpulan secara menyeluruh dari penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran bagi perusahaan.